

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pengelola keuangan, pelaporan anggaran, serta administrasi publik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, serta memberikan kemudahan dalam akses informasi kepada masyarakat (Wahyudi et al., 2024). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang relevan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelola keuangan dan tata kelola pemerintahan secara umum (Gustini et al., 2024). Dalam implementasinya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan penting dalam mendukung *good governance* dengan memastikan bahwa proses pemerintahan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik (Putriani & Fanida, 2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga mendukung pengelola anggaran yang lebih baik dan memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan laporan yang lebih akurat, efisien, dan tepat waktu (Saharah et al., 2020).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu inovasi dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pengelola anggaran secara efisien. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan, melaporkan anggaran, serta memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah (Setiawan & Anisykurlillah, 2024). Sistem ini dirancang untuk menyelaraskan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan program pembangunan serta transparansi dalam pengelola dana publik (Prasetyo et al., 2023). Dalam konteks regulasi, SIPD diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa semua perangkat daerah wajib menggunakan sistem ini sebagai alat pengelola dan pelaporan keuangan daerah (Amanda & Sudrartono, 2023).

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) membawa dampak positif dalam mempercepat proses perencanaan dan penganggaran, sekaligus meningkatkan akurasi dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah (Balqis & Fadhly, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga berkontribusi terhadap efisiensi waktu dalam penyusunan laporan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui proses yang lebih transparan dan akuntabel (Ruslie & Hapsari, 2019). Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan transparansi publik. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi yang lebih terbuka dan akurat mengenai pengelola dana publik, sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah (Setyawan, 2020). SIPD berfungsi sebagai media akuntabilitas publik yang menjadi transparansi informasi kepercayaan publik terhadap evaluasi kinerja pemerintah, program-program pembangunan dan pencapaian pembangunan.

Penilaian kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan siklus anggaran tahunan. Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu jujur, objektif, akurat dan transparan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah berfokus pada hasil yang dicapai pemerintah sedangkan akuntabilitas berfokus pada proses bagaimana hasil tersebut dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Kedua elemen ini sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

Penilaian LAKIP biasanya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk tingkat nasional dan provinsi, serta oleh Inspektorat Daerah untuk tingkat kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan data dari Biro Organisasi Jawa Timur, penilaian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember berada pada peringkat yang relatif rendah diantara Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pada data yang tersedia, Kabupaten Jember mendapatkan predikat "B" dengan nilai yang bervariasi di tahun yang berbeda.

Tabel 1.1 Hasil Penilaian Laporan Kinerja Kabupaten Jember Selama Tahun 2019-2024

Tahun	Angka	Predikat	Aplikasi
2019	60,75	B	SIMDA
2020	61,60	B	SIMDA
2021	62,06	B	SIPD
2022	63,15	B	SIPD

Tahun	Angka	Predikat	Aplikasi
2023	62,14	B	SIPD
2024	63,70	B	SIPD

Sumber: Data Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur

Tabel 1.1 menunjukkan penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember selama tahun 2019-2024, yang disandingkan dengan aplikasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pada tahun 2019-2020 implementasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dapat memerikan kenaikan penilaian laporan kinerja Instansi pemerintah daerah dari 60,75 menjadi 61,60 pada tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2021, penilaian laporan kinerja meningkat sedikit sebesar 1% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sebesar 2%. Namun, penurunan sebesar 2% terjadi pada tahun 2023, diikuti oleh peningkatan sebesar 3% pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan penilaian kinerja pemerintah daerah dalam penerapan implementasi aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun, ada faktor-faktor yang tidak terduga atau tidak terkelola dengan baik, yang mempengaruhi implementasi sebuah sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) suatu daerah dilakukan melalui evaluasi yang sistematis terhadap berbagai aspek pengelolaan kinerja dan akuntabilitas. Secara umum, penilaian LAKIP berfokus pada lima komponen utama, dengan bobot yang berbeda-beda, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja (Bobot 35%) menilai kualitas perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk:
 - Rencana Strategis (Renstra) : Kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan daerah.
 - Rencana Kinerja Tahunan (RKT) : Kejelasan target dan indikator kinerja yang ditetapkan.
 - Penetapan Kinerja : Proses penetapan sasaran dan indikator kinerja yang terukur (SMART: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).
2. Pengukuran Kinerja (Bobot 20%) mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah melakukan pengukuran kinerja, meliputi : pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, Implementasi Pengukuran
3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) menilai kualitas laporan kinerja yang dihasilkan meliputi :
 - Pemenuhan Laporan : laporan kinerja disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
 - Penyajian Informasi Kinerja: Kejelasan, akurasi, dan kelengkapan

informasi kinerja yang disajikan.

- Pemanfaatan Informasi Kinerja : informasi kinerja digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa depan.
4. Evaluasi Kinerja (Bobot 10%) menilai bagaimana pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai:
- Pemenuhan Evaluasi : Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sistematis.
 - Kualitas Evaluasi : Kedalaman analisis terhadap capaian kinerja, identifikasi masalah, dan rekomendasi perbaikan.
 - Pemanfaatan Hasil Evaluasi : hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
5. Pencapaian Kinerja (Bobot 20%) menilai hasil konkret yang telah dicapai oleh pemerintah daerah, terdiri dari :
- Kinerja yang Dilaporkan (Output dan Outcome): Capaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
 - Kinerja Lainnya: Capaian-capaian lain yang signifikan namun mungkin tidak secara eksplisit tercantum dalam indikator kinerja rutin.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap lima komponen di atas, pemerintah daerah Kabupaten Jember selama tahun 2019-2024 mendapatkan penilaian dengan predikat B (Baik). Predikat “B” mengindikasikan bahwa secara umum, Kabupaten Jember telah memiliki sistem pengelolaan kinerja dan akuntabilitas yang baik, namun masih terdapat komponen yang perlu ditingkatkan untuk mencapai predikat yang lebih tinggi (BB, AA dan A). Dalam hal perencanaan kinerja, Kabupaten Jember sudah tersusun dengan baik, namun belum sepenuhnya ideal dalam hal target yang sangat terukur. Pengukuran kinerja sudah dilakukan namun kualitas indikator/implementasinya masih belum optimal. Laporan Kinerja sudah menyajikan informasi kinerja namun masih ada ruang dalam peningkatan dalam hal analisis atau penyajian data. Evaluasi kinerja telah dilakukan namun pemanfaatannya untuk perbaikan belum maksimal. Pencapaian kinerja telah tercapai dengan baik namun ada beberapa indikator yang belum optimal.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jember yang bertujuan meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan, mempercepat proses perencanaan pembangunan, dan memberikan akses informasi yang lebih transparan kepada masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparansi publik, meskipun implementasinya kerap menghadapi kendala seperti kurangnya infrastruktur teknologi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi ini. Keberhasilan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas publik tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai pemerintah daerah, serta komitmen politik dari pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan yang optimal (Khadija et al., 2024).

Urgensi penelitian ini muncul karena Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang diwajibkan secara nasional, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan seperti ketidaksiapan SDM, hambatan teknis, serta kurangnya integrasi antar proses perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini ingin mengeksplorasi pengalaman pengguna secara langsung, karena pemahaman atas pengalaman tersebut dapat memberikan insight yang lebih mendalam terhadap efektivitas SIPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun beberapa daerah telah berhasil meningkatkan transparansi melalui sistem *e-government*, masih terdapat hambatan terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan akses internet yang terbatas di beberapa wilayah (Khadija et al., 2024). Selain itu, hambatan lain yang sering muncul adalah rendahnya literasi teknologi informasi di beberapa perangkat daerah, yang mengakibatkan sistem tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyusunan laporan keuangan daerah (Diana et al., 2019).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun program-program pembangunan yang lebih terarah dan akuntabel. Namun, karena kompleksitas pengelola SIPD yang melibatkan banyak aktor dan proses, dibutuhkan pendekatan eksplorasi berbasis data lapangan untuk memahami bagaimana penggunaannya dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pendekatan *Grounded Theory* menjadi relevan untuk menggali pengalaman langsung pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan mengembangkan teori baru yang menjelaskan dinamika implementasi sistem ini secara lebih mendalam.

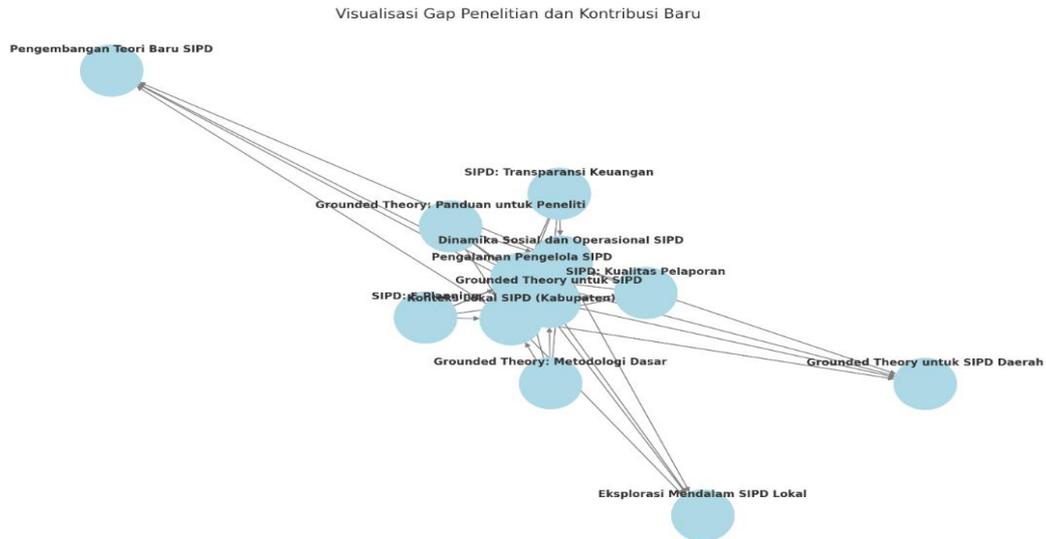
Grounded Theory merupakan sebuah metodologi penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan teori berdasarkan data empiris yang dikumpulkan secara sistematis. Metodologi ini awalnya diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss pada tahun 1967, dan sejak itu menjadi salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam penelitian sosial. *Grounded Theory* memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, memahami, dan menjelaskan proses sosial serta interaksi melalui pengumpulan dan analisis data secara iteratif (Lianto, 2019). Salah satu ciri utama *Grounded Theory* adalah proses pengkodean data yang melibatkan tiga tahapan, yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *Selective coding*, yang bertujuan untuk menghasilkan konsep-konsep inti dari data yang diperoleh (Tie et al., 2019). Dalam penerapannya, *Grounded Theory* juga mendorong pengelola pendekatan iteratif, di mana pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan untuk memastikan hasil yang valid dan relevan dengan konteks penelitian (Eppich et al., 2019). Pendekatan ini sering digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks, terutama dalam situasi di mana literatur yang ada masih terbatas atau tidak cukup menjelaskan fenomena yang sedang diteliti (Niasse, 2023).

Grounded Theory sering dianggap sebagai metodologi yang fleksibel karena memungkinkan peneliti untuk membangun teori langsung dari data tanpa harus terikat pada kerangka teori yang telah ada sebelumnya. Metode ini cocok digunakan dalam penelitian eksploratif untuk memahami bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dengan fenomena tertentu dalam konteks sosial mereka (Turner & Astin, 2021). Dalam aplikasinya, *Grounded Theory* menggabungkan proses induktif dan komparatif untuk mengidentifikasi pola-pola penting dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen (Milani & Hashemi, 2020). Salah satu keunggulan *Grounded Theory* adalah kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai teknik pengumpulan data dengan proses analisis iteratif, seperti *theoretical sampling* dan *constant comparison*, yang memastikan bahwa teori yang dihasilkan benar-benar relevan dengan konteks penelitian (Makri & Neely, 2021). Lebih lanjut, pendekatan ini telah diadaptasi dalam berbagai disiplin ilmu, seperti manajemen, pendidikan, dan kesehatan, untuk memahami dinamika sosial yang kompleks dan menciptakan teori yang substantif serta dapat diaplikasikan dalam praktik nyata (Hafer & Kitchens, 2022). *Grounded Theory* memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang belum banyak dipahami dengan menghasilkan teori yang benar-benar didasarkan pada data. Metodologi ini dirancang untuk menggali dinamika kompleks dalam interaksi sosial dan proses yang melibatkan berbagai aktor dalam suatu konteks tertentu (Birks et al., 2019).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di pemerintahan daerah. Penerapan SIPD dan sistem terkait, seperti Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD), terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan daerah (Gustini et al., 2024). Selain itu, SIPD mendukung *e-planning* untuk perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, meskipun keterbatasan jaringan dan kapasitas pengguna menjadi kendala signifikan (Putriani & Fanida, 2022). Evaluasi efektivitas SIPD juga telah dilakukan dengan pendekatan teori DeLone dan McLean untuk mengukur dampak terhadap kualitas laporan keuangan (Wahyudi et al., 2024). Dalam konteks arsip pemerintahan, SIPD menjadi bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendukung transparansi administratif (Khadija et al., 2024). Selain itu, implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi membantu peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pelaporan keuangan daerah (Diana et al., 2019). Pada masa pandemi, SIPD juga menjadi elemen penting dalam mendukung kelangsungan pelayanan publik secara daring dan mempercepat proses administrasi (Salsabila et al., 2023). Studi lain menunjukkan bahwa kerangka TOGAF ADM mendukung penerapan SIPD melalui integrasi proses bisnis dengan teknologi informasi (Saharah et al., 2020). Selain itu, standar internasional ISO/IEC 25010 digunakan untuk mengevaluasi kualitas sistem

informasi pemerintahan guna meningkatkan performa SIPD (Suparto & Dai, 2021). Penelitian juga menemukan bahwa SIPD memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas data anggaran bagi masyarakat untuk mendukung transparansi publik (Setyawan, 2020). Selain itu, penerapan sistem informasi akuntansi daerah berkontribusi pada efisiensi tata kelola keuangan secara keseluruhan (Listyani, 2019). Di sisi lain, *Grounded Theory* menjadi pendekatan metodologi yang relevan untuk mengeksplorasi pengalaman pengguna SIPD secara mendalam, terutama dalam memahami dinamika sosial dan operasional yang belum terungkap.

Penelitian terdahulu mengenai *Grounded Theory* juga memunculkan hal yang menarik. Pendekatan *Grounded Theory* menjadi metodologi penting dalam penelitian sosial untuk mengembangkan teori berbasis data empiris. Penelitian sebelumnya telah membahas langkah-langkah metodologi ini, seperti pengumpulan data yang sistematis melalui observasi mendalam dan wawancara, yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam (Lianto, 2019). *Grounded Theory* juga memberikan panduan bagi peneliti pemula untuk memahami iterasi data, analisis perbandingan konstan, dan pengkodean data yang fleksibel (Tie et al., 2019). Prinsip-prinsip utama *Grounded Theory*, seperti pengumpulan data iteratif dan fleksibilitas analisis, dijelaskan secara terperinci untuk membantu peneliti mencapai pemahaman konseptual yang mendalam (Eppich et al., 2019). Dalam penelitian lain, ciri khas studi *Grounded Theory*, termasuk pentingnya tinjauan literatur dalam pendekatan ini, diidentifikasi untuk memaksimalkan hasil penelitian (Turner & Astin, 2021). Selain itu, variasi pendekatan seperti Glaserian, Straussian, dan konstruktivis juga dieksplorasi untuk menyesuaikan metodologi dengan berbagai konteks penelitian (Niasse, 2023). Pendekatan *Grounded Theory* telah dikembangkan untuk menghasilkan teori lintas disiplin melalui penggabungan konsep-konsep multidisiplin, yang dikenal sebagai *Extended Grounded Theory* (Milani & Hashemi, 2020). Prinsip dasar metodologi ini, seperti proses pengkodean dan pengambilan sampel teoritis, diperkenalkan sebagai panduan penting bagi peneliti yang ingin mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks (Ravindran, 2024). Dalam konteks pendidikan, *Grounded Theory* digunakan untuk mengidentifikasi pendekatan-pendekatan yang sering diterapkan dalam penelitian pendidikan terkemuka (Stough & Lee, 2021). Studi lain menekankan pentingnya *Grounded Theory* untuk menghasilkan teori substantif dari data empiris, yang relevan dalam berbagai konteks sosial, termasuk administrasi publik (Liu, 2022). Metodologi ini juga relevan dalam administrasi non-profit untuk menghasilkan teori yang mendukung praktik administratif yang lebih baik (Hafer & Kitchens, 2022).



Gambar 1.1 Visualisasi Penelitian Terdahulu

Gambar 1.1 menunjukkan visualisasi penelitian terdahulu terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan *Grounded Theory* serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Visualisasi ini mencerminkan bahwa penelitian terdahulu telah banyak membahas aspek transparansi keuangan, kualitas laporan, dan implementasi *e-planning* dalam SIPD, serta prinsip dasar dan metodologi pengkodean dalam *Grounded Theory*. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, terutama dalam memahami pengalaman pengguna SIPD, dinamika sosial dan operasional dalam implementasinya, serta pengelola pendekatan *Grounded Theory* dalam mengembangkan teori baru terkait sistem ini. Khususnya dalam konteks daerah seperti Kabupaten Jember, penelitian mengenai penerapan SIPD masih terbatas, meskipun kebijakan dan infrastruktur tiap daerah berbeda dan memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengeksplorasi lebih dalam implementasi SIPD dalam skala lokal, menggunakan pendekatan *Grounded Theory* untuk memahami fenomena ini secara induktif berdasarkan pengalaman langsung pengguna, serta mengembangkan teori baru yang dapat berkontribusi pada perbaikan sistem dan kebijakan pemerintahan daerah agar lebih akuntabel dan transparan.

Berdasarkan fenomena ini, pendekatan *Grounded Theory* digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman para pengguna SIPD di Kabupaten Jember. Pendekatan ini relevan dikarenakan memungkinkan pengembangan teori baru yang didasarkan pada data empiris dari lapangan. Dengan memahami berbagai tantangan dan keberhasilan implementasi SIPD secara langsung dari perspektif pengguna, *Grounded Theory* dapat menghasilkan konsep-konsep inti yang menjelaskan bagaimana SIPD berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas publik serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengelola sistem di masa

depan.

Dengan mempertimbangkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam memahami implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui pendekatan *Grounded Theory*. Melalui eksplorasi mendalam terhadap pengalaman penggunaan SIPD di Kabupaten Jember, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori baru yang tidak hanya menjelaskan dinamika sosial dan operasional dalam penerapan sistem ini, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi peningkatan akuntabilitas publik di pemerintahan daerah, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dalam bidang sistem informasi pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai tantangan dan dinamika operasional masih menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks pemerintahan daerah seperti di Kabupaten Jember. Meskipun SIPD telah dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelola keuangan daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah mampu mengoptimalkan sistem ini secara efektif. Beberapa faktor seperti kesiapan infrastruktur, pemahaman pengguna, serta kebijakan internal dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Selain itu, penelitian terdahulu masih terbatas dalam menggali pengalaman langsung para pengguna SIPD dalam menghadapi kendala dan mencari solusi terbaik dalam operasionalnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Grounded Theory* untuk mengungkap secara mendalam bagaimana pengalaman pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas publik, dengan tujuan untuk merumuskan teori baru yang relevan dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan tantangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama yang akan dieksplorasi dalam rangka mengembangkan teori baru terkait implementasi SIPD di tingkat daerah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman pengguna dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jember?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pengguna dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas publik?
3. Bagaimana strategi yang digunakan pengguna dalam mengatasi kendala dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)?
4. Bagaimana kontribusi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap peningkatan transparansi dan efisiensi pengelola keuangan daerah?

5. Bagaimana pendekatan *Grounded Theory* dapat digunakan untuk mengembangkan teori baru terkait pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di tingkat daerah?
6. Bagaimana teori baru yang telah muncul dalam penelitian ini dikembangkan serta dapat berkontribusi pada peningkatan kebijakan atau strategi pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam pengalaman pengguna dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jember, serta mengembangkan teori baru yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas publik. Dengan menggunakan pendekatan *Grounded Theory*, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap pola, tantangan, strategi, serta dampak implementasi SIPD dari perspektif pengguna. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan tujuan utama tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan spesifik sebagai berikut:

1. Menganalisis pengalaman pengguna dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jember.
2. Mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas publik.
3. Mengungkap strategi yang digunakan oleh pengguna dalam mengatasi kendala dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
4. Mengevaluasi kontribusi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pengelola keuangan daerah.
5. Menggunakan pendekatan *Grounded Theory* untuk mengembangkan teori baru yang dapat menjelaskan pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di tingkat daerah.
6. Mengembangkan teori baru yang dapat berkontribusi dalam peningkatan kebijakan serta strategi pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademik maupun praktis, terutama dalam memahami implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan bagaimana pendekatan *Grounded*

Theory dapat digunakan untuk mengembangkan teori baru yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan daerah. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sistem informasi pemerintahan dan metodologi *Grounded Theory*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menambah wawasan akademik mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas publik di pemerintahan daerah.
2. Mengembangkan teori baru yang menjelaskan pola penerapan, tantangan, dan strategi pengelola SIPD berdasarkan data empiris.
3. Memperluas pengelola pendekatan *Grounded Theory* dalam penelitian kebijakan publik dan sistem informasi pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), antara lain:

1. Pemerintah Daerah: Memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah.
2. Pengguna SIPD: Membantu para pengguna sistem dalam memahami tantangan yang dihadapi serta strategi terbaik untuk mengatasi kendala dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3. Pembuat Kebijakan: Menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam mengelola sistem informasi pemerintahan.

1.4.3 Manfaat Metodologis

Penelitian ini juga memiliki manfaat dalam aspek metodologi penelitian, khususnya dalam penerapan *Grounded Theory* dalam studi kebijakan dan sistem informasi pemerintahan. Adapun manfaat metodologis yang diharapkan meliputi:

1. Memberikan referensi mengenai pengelola *Grounded Theory* dalam memahami fenomena sosial dan operasional dalam pemerintahan daerah.
2. Menyediakan panduan bagi penelitian lain yang ingin menggunakan metode serupa dalam mengkaji implementasi teknologi informasi di sektor publik.

Dengan manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang signifikan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam praktik pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

